

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah di amandemen memberikan jaminan seperti yang tercantum pada pasal 31, ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang dimaksud dengan pemerintah dalam undang-undang ini adalah Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Termasuk untuk anak yang berkebutuhan khusus dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Hal ini sejalan dengan seruan *Internasional Education for All (EFA)* yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global yaitu *World Education Forum* di Dakar, Sinegal tahun 2000 bahwa penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015 dan Indonesia termasuk dalam kesepakatan itu.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan hendaknya memberikan jaminan bahwa setiap anak akan mendapat pelayanan untuk mengembangkan potensinya secara individual. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama seperti anak lainnya (anak normal) dalam mengakses pendidikan.

Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang *disabilitas*,

terpinggirkan dan terabaikan. Prinsip pendidikan inklusif diadopsi dari Konferensi Salamanca tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (UNESCO, 1994) dan di ulang kembali pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar tahun 2000. Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa: sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, social, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan serta anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon dan menerima keberagaman peserta didik, dengan tujuan guru dan siswa merasa nyaman dalam keberagaman, dan melihat keberagaman sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, karena keberagaman bukanlah suatu masalah yang harus ditakuti. Skjørten (2003; 50) menyatakan bahwa legislasi dan peraturan saja tidak cukup untuk dapat melaksanakan inklusif. Proses menuju inklusif ini panjang dan, antara lain, membutuhkan: 1) perubahan hati dan sikap, 2) reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran dan manajemen kelas, termasuk penyesuaian lingkungan, 3) redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia, 4) redefinisi peran SLB yang ada, misalnya, dapatkan sekolah-sekolah ini secara bertahap mulai berfungsi sebagai pusat sumber yang ekstensif?, 5) penyediaan bantuan professional bagi para guru dalam bentuk: (a) reorientasi pendidikan guru sehingga guru-guru baru dapat memberikan kontribusi kepada proses menuju inklusif dan bersikap fleksibel jika diperlukan, (b) reorientasi pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah dan guru kelas sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan, dan (c) layanan guru kunjung menurut kebutuhan, 6) pembentukan, peningkatan dan pengembangan kemitraan antara guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta

pertukaran pengalaman, bantuan dan nasehat. Menurut Stubbs (2002; 10), ada tiga faktor utama penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu: 1) kerangka kerja yang kuat, meliputi nilai-nilai, keyakinan, prinsip-prinsip utama, indikator keberhasilan; 2) implementasi dalam budaya dan konteks lokal; dan 3) monitoring partisipatori berkesinambungan.

Dalam memulai menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah, perlu adanya sikap penerimaan dari hati, karena tanpa adanya sikap menerima tersebut, maka pelaksanaan pendidikan inklusif tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di sini kepala sekolahlah yang sangat berperan dalam pengambilan keputusan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif disekolahnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan hasil dari keputusan dan ketetapan yang di diskusikan secara bersama-sama. Majunya sebuah organisasi dan lembaga itu semua tergantung dari kemampuan manajemen pemimpinnya, termasuk juga sekolah. Kepala sekolah adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah termasuk didalamnya adalah penanggung jawab pelaksanaan administrasi sekolah.

Bagi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sekolah inklusif, terutama bagaimana mengembangkan budaya organisasi yang inklusif, mendorong kinerja guru lebih tinggi, memotivasi guru, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (orang tua, para ahli, dan stakeholder lainnya). Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam menerjemahkan kebijakan dari pimpinan lebih tinggi sesuai dengan visi, misi dan sasaran sekolah yang mengacu kepada sumber daya di dalam dan luar sekolah. Kepala sekolah dengan otonomi yang lebih luas memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan pengembangan sekolah. Karena itu, kebijakan pengembangan sekolah perlu dipahami agar formulasi kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai kualitas unggul dalam proses kegiatan dan lulusan yang sesuai harapan masyarakat.

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggaraan pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah (Syafaruddin, 2008). Berawal dari UUD 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk menyentuh langsung keperluan *stakeholders* pendidikan, khususnya anak didik. Jadi, setiap kebijakan harus selalu berhubungan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

Sebagai pemimpin, keberadaan kepala sekolah menduduki peran yang amat penting dalam melaksanakan kebijakan pimpinan puncak (*top leader*) untuk mengelola seluruh sumber daya yang dapat mendukung pencapaian keunggulan sekolah. Mengacu kepada hasil penelitian terhadap sekolah di British, menurut Duke dan Candy (Syafaruddin ; 2008) ada beberapa fokus kebijakan sekolah, yaitu: (1) melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, (2) kurikulum, (3) imbalan dan hukuman, (4) keterlibatan orang tua, (5) peluang bagi pelajar, (6) iklim sekolah.

Perlu dicermati oleh kepala sekolah dalam membuat kebijakan baru adalah menciptakan keadaan baru. Suatu kebijakan baru merupakan penciptaan keadaan baru dari rutinitas yang memungkinkan mendapat penolakan dari personel sekolah. Karena itu, perlu melibatkan personel sekolah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan baru sekolah supaya ada proses pembelajaran, dan komitmen dalam keberhasilan kebijakan meningkatkan mutu sekolah.

Kebijakan merupakan salah satu dari dimensi dalam indeks inklusi. Indeks untuk Inklusi adalah satu set bahan untuk memandu sekolah melalui proses pengembangan sekolah inklusif. Ini adalah tentang membangun

masyarakat yang mendukung dan mendorong prestasi tinggi untuk semua staf dan mahasiswa. Indeks Inklusi meliputi tiga dimensi perkembangan sekolah yang saling terkait yaitu menciptakan budaya inklusif, membuat kebijakan-kebijakan inklusif, dan mengembangkan praktik-praktik inklusif. Dimensi-dimensi tersebut mengarahkan cara berpikir kearah perubahan sekolah yang lebih inklusif, oleh karena itu semua rencana perubahan sekolah harus memperhatikan ketiga dimensi tersebut, sehingga dengan adanya budaya inklusif dalam sekolah, perubahan kebijakan dan praktik diharapkan akan dapat dijaga terus oleh semua komunitas yang ada disekolah. Indeks inklusi menawarkan sebuah proses review diri dan perkembangan yang bersifat mendukung atau *supportif* pada sekolah inklusif, proses tersebut mengacu pada pandangan kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, serta anggota komunitas lingkungan sekitar yang lain. Pada sekolah Inklusif memerlukan dilakukannya pengamatan yang detail untuk mengetahui bagaimana hal-hal yang menghambat partisipasi dan proses pembelajaran siswa dapat dikurangi.

Pada dimensi kebijakan, kebijakan-kebijakan inklusif yang memastikan bahwa inklusi dilakukan di semua rencana sekolah, kebijakan-kebijakan yang dibuat mendorong adanya partisipasi siswa dan staf sejak pertama kali mereka menjadi bagian dari sekolah, menjangkau semua siswa di lingkungan sekolah, serta meminimalisir adanya tekanan ekslusioner, semua kebijakan menggunakan strategi perubahan yang jelas, yang dimaksud dengan dukungan di sini adalah semua kegiatan yang meningkatkan kapasitas sekolah untuk menanggapi perbedaan siswa. Semua bentuk dukungan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip inklusif dan disatukan dalam sebuah kerangka tunggal.

Tahun 2004 pendidikan inklusif di Provinsi Jambi baru mulai dirintis dengan ditunjuknya tiga Sekolah Dasar Negeri, yaitu satu di Kota Jambi, satu di Kabupaten Muara Jambi dan satu lagi di Kabupaten Bungo. Di tiga sekolah ini pendidikan inklusi berjalan dengan berbagai hambatan dan

kesulitan yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak. Adapun dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif tidaklah mudah. Hambatan-hambatan yang sering terjadi pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini adalah kurangnya dukungan dari berbagai pihak setempat. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran (rasa penerimaan, keterbukaan, keingintahuan) khususnya dari kepala sekolah dan sebagian guru reguler kini sekolah inklusif makin berkembang.

Pendidikan inklusi di Jambi bukan hanya berlangsung di beberapa Sekolah Dasar tetapi juga di beberapa SMP dan SMA/SMK. Daftar siswa inklusi Propinsi Jambi hingga Maret 2012 terdapat 72 orang siswa inklusi yang terdiri dari siswa SD, SMP dan SMA/SMK (*Sumber dari Ketua Forum Komunikasi Inklusi Propinsi Jambi, Maret 2012*)

Fenomena yang peneliti temukan dilapangan, tepatnya di salah satu Sekolah X di Kota Jambi ini adalah, peneliti menemukan bahwasanya Sekolah X telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2004 lalu dan merupakan sekolah pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolahnya. Di tengah minimnya dukungan dari pemerintah daerah setempat terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, menjadikan Sekolah X Kota Jambi tidak patah semangat untuk tetap konsisten dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, bahkan Sekolah X Kota Jambi lebih berusaha sendiri untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X ini berjalan dengan baik, diantaranya terlihat adanya sikap penerimaan dari semua masyarakat sekolah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, penerimaan-penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut pun sangat terbuka, di adakannya sarana dan prasarana yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus untuk menggunakannya, dan penyesuaian kurikulum untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang di buat fleksibel.

Saat ini pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi bukanlah merupakan suatu hal baru, hampir semua masyarakat sekolah mentehai apa

itu pendidikan inklusif. Berbagai macam dukungan dari masyarakat sekolah terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, karena semua masyarakat sekolah sangat bersemangat dalam penyelenggaraannya. Semangat dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif ini terlihat dengan adanya partisipasi yang mendukung terlaksananya penyelenggaraa pendidikan inklusif ini. Suksesnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X kota Jambi tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah.

Adapun proses menuju sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini tidaklah mudah. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan perjuangan dan tingkat kesabaran yang cukup tinggi, karena tidak serta merta guru, komite dan siswa maupun orang tua menerima keputusan tersebut. Terlebih Sekolah Dasar X Kota Jambi selama dari tahun 2004 telah melakukan tiga kali pergantian kepala sekolah, sehingga dalam proses pengambilan kebijakannya tidaklah mudah. Beberapa faktor mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan inklusif ini, ada yang mendukung dan adapula yang menolak kebijakan tersebut. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan penjelasan yang jelas terkait kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya.

Terkait kebijakan-kebijakan yang di buat kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif inilah yang mendasari peneliti tertarik atas fenomena tersebut, dan ingin mengkaji kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena tidak banyak kepala sekolah yang berkeinginan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di sekolah nya. Di Provinsi Jambi sendiri belum ada yang mengatur terkait kebijakan-kebijakan penyelenggaraan sekolah inklusif, baik itu Peraturan Daerah atau pun Peraturan Gubernurnya, sehingga sosialisasi pendidikan inklusif ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam secara sistematis mengenai “*Kebijakan –kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi*”, sehingga kebijakan-kebijakan kepala sekolah ini mampu mendorong partisipasi dari sekolah-sekolah lainnya agar bisa menyelenggarakan sekolah inklusif secara bersama-sama, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah lebih baik lagi, khususnya di Kota Jambi. Adapun kebijakan-kebijakan yang maksud merupakan usaha-usaha yang dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikan inklusif agar dalam proses penyelenggaraannya dapat berjalan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana “*Kebijakan – kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi?*”

Berdasarkan fokus masalah tersebut, selanjutnya diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi faktual kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi?
2. Apa peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi?
3. Apa yang menjadi pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi?
4. Bagaimana rancangan desain kebijakan kepala sekolah berdasarkan hasil kajian peneliti dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang kebijakan-kebijakan yang diambil kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengkaji:

1. Kondisi faktual kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi
2. Peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi
3. Pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi
4. Rancangan desain kebijakan kepala sekolah berdasarkan hasil kajian peneliti dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik itu untuk keperluan peneliti sendiri, orang tua, guru, kepala sekolah, sekolah, dan Dinas Pendidikan.

- a. Bagi peneliti, selain peneliti bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang di laksanakan kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikan inklusif, peneliti juga dapat mengetahui sejauh mana pendidikan inklusif ini berjalan pada sekolah tersebut serta dapat membantu kepala sekolah dalam merancang sebuah desain kebijakan yang nantinya kebijakan yang dikeluarkan lebih terarah.
- b. Bagi orang tua, penelitian ini bermanfaat agar orang tua dapat mengetahui dan memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah

dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, serta dapat mendukung kebijakan tersebut.

- c. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan memahami serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah X.
- d. Bagi kepala sekolah, manfaat dari penelitian ini agar kepala sekolah lebih mengetahui peran kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan agar kebijakan-kebijakan yang di buat dapat diterima oleh semua pihak.
- e. Bagi Dinas Pendidikan, diharapkan manfaat dari penelitian ini Dinas Pendidikan lebih memperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan bisa mensosialisaikan sekolah inklusif ini ke semua sekolah baik di Kota maupun di Provinsi.